

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

The Influence Of Regional Original Income And Balanced Funds On Capital Expenditure In The Barru District Government

Nur Nilam Sari¹, Yadi Arodhiskara², Jumriani³

Email : nurnilamsari1312@gmail.com¹, yadhi01@gmail.com², jumrianisemsi@gmail.com³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jendral Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji *f*, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selanjutnya, hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

Abstract

*This research aims to determine the influence of Original Regional Income and Balancing Funds on Capital Expenditure in the Barru Regency government. The data collection techniques used in this research are observation and documentation. The data analysis technique in this research is multiple linear regression analysis. Based on the *f* test, the variables of Original Regional Income and Balancing Funds simultaneously influence Capital Expenditure. Furthermore, the results of the *t* test show that the variables of Original Regional Income and Balancing Funds have a partial effect on Capital Expenditure*

Keywords : Original Regional Income, Balancing Fund, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan setiap daerah di Indonesia sejalan dengan munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Otonomi daerah telah dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2002 telah menciptakan peralihan setiap kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah yang mana awalnya Sentralisasi menjadi Desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah dilaksanakan secara demokratis dan mencapai desentralisasi yang sebenarnya agar mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, keadilan serta pemerataan. (Husaeri, 2021)

Pengeluaran daerah salah satunya belanja modal yang merupakan salah satu pos pengeluaran APBD terbesar. Sehingga pengeluaran belanja modal ini penting karena menjadi pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat daerah. Selain itu, pemanfaatan belanja yang dialokasikan harusnya lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang produktif dalam menunjang aktivitas daerah.

Peningkatan pengalokasian anggaran belanja modal bisa menyebabkan peningkatan pada infrastruktur. Belanja modal bisa mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, bisa diartikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sedikit terganggu.

Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan

rakyat, tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah masalah alokasi anggaran, dimana peningkatan belanja modal tidak diimbangi dengan peningkatan pembangunan, dikarenakan banyaknya penerimaan yang tidak semua digunakan untuk membiayai belanja modal namun ada sebagian yang digunakan untuk membiayai belanja operasi.

Diketahui rata-rata anggaran dana belanja modal Kabupaten Barru dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif yang cukup signifikan, akan tetapi fluktuatif tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan penyerapan anggaran yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan dana perimbangan juga dapat membantu menambah pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis dijelaskan melalui kerangka pikir sebagai berikut:

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

H2: Diduga Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

H3: Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dimana dalam pelaksanaan metode terdiri dari data dan angka yang memiliki sebab akibat antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data *timeseries*. Data *timeseries* adalah data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam rentang waktu tertentu. Sumber data berupa data primer yang dikumpulkan langsung pada objek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Barru.

Sampel pada penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Barru dengan teknik pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan peneliti dalam penentuan sampel yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan memiliki Laporan Realisasi Anggaran APBD selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka diambil data Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun 2017 sampai dengan 2023.

Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas data, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas. Metode analisis linear berganda dinilai dengan koefisien determinasi, uji t dan uji f.

HASIL PENELITIAN

Table 1 Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Barru 2017-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2017	30.135.668.356,00	101.244.564.233,00	345.267.023.968,10
2018	25.354.655.828,32	238.448.805.220,00	260.726.828.092,55
2019	23.543.751.269,00	200.311.242.864,00	218.826.518.188,12
2020	24.500.494.763,12	95.128.651.553,24	127.312.791.931,36
2021	25.563.331.706,33	79.138.326.886,40	112.254.470.242,73
2022	24.410.030.317,00	85.189.762.348,00	145.652.719.665,00
2023	25.392.272.889,00	90.240.231.345,00	148.016.364.234,00

Pada tabel 1 terdapat 3 (tiga) data yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data dengan pengujian asumsi klasik dan regresi linear berganda yang telah diperoleh.

Tabel 2 Uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94701041
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.137
	Negative	-.179
Test Statistic		.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

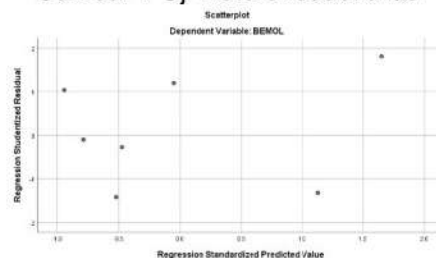
Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dari pengelolaan SPSS, hasil yang didapat berdasarkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, adalah 0,200 lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

Tabel 3 Uji Multikolonieritas

Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.941	1.063
DAPER	.941	1.063

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel-variabel diatas memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yaitu senilai 0.941. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

Gambar 1 Uji Heterokedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara

$F_{hitung} 18.758 > F_{tabel} 5,786$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Besarnya nilai yang didapatkan menunjukkan nilai yang berpengaruh positif artinya jika pendapatan asli daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi dana perimbangan yang biasadialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang membiayai belanja daerah khususnya belanja modal.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan pada kabupaten/kota semakin besar pula belanja modalnya. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal tahun 2017-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan maka semakin besar pula pengalokasian terhadap belanja modal. Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya baik untuk kepentingan nasional. Maupun kepentingan rakyat.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset.

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah dan untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum.

Fungsi dari dana perimbangan ini menyerupai PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah belanja modal. Meskipun dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai kebutuhan belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Bagi Pemerintah Kabupaten Barru diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber daerah yang dimiliki agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pembuatan peraturan daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian daerah. Alokasi dana perimbangan harusnya lebih diprioritaskan pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan kepentingan dan pelayan masyarakat. Belanja modal yang dialokasikan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, A. B. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)*. Surakarta: Univeristas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Andres, P. S. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pasaman Barat, Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, W. (2021). *PENGELOLAAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG*. *Cateris Paribus Journal*, Volume 1 Nomor 2.
- Dyahnisa, T. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Eky Ermal Muttaqin, W. P. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat*. *Langkat: Economic, Bussiness and Management Science Journal*.
- Endang, M. L. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA*. MEDAN: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Husaeri Priatna, J. P. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH*. Bandung: JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.
- Husni, W. (2021). *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar*. *Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar*.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD 2021.*
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD 2023.*
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

- Nabiyatun Nur Fatimah, A. N. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan, S. T. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Jurnal Pendidikan Akuntansi.
- Ni Luh Putu Dita Silviani, I. M. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Bali*. Bali: Jurnal Riset Akuntansi.
- Nugrah, J. (2023). ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, Volume 3 Nomor 2.
- Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN .*
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.*
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.*
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- PMK Nomor 104 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Negara/Lembaga.*
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rinaldi, A. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Rinrin, R. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT*. Bandung: Studi Keuangan Publik.
- Ririn, A. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daaerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Pare-pare*. PARE-PARE: IAIN Pare-Pare.
- Rizka, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)*. *Skripsi : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang*.
- Rochmat, A. P. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Deangan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.
- Saleh, R. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR*. *Jurnal Informasi Perpajakan dan Keuangan Publik*, 111-134.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.